

**PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DALAM PENINGKATAN KINERJA
KEUANGAN PADA PT BANK
SULSELBAR MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

Dian Fahira

4518012177

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PERAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN
PADA PT. BANK SULSELBAR

MAKASSAR

Nama Mahasiswa : DIAN FAHIRA

Stambuk/NIM : 4518012177

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Tempat Penelitian : Bank Sulselbar Makassar

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H.A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., SH., MH


Dr. Ir. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM., IPU

Mengetahui dan Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

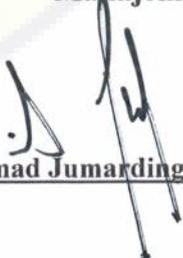
Ketua Program Studi



Universitas Bosowa

Manajemen


Dr. HJ. Herminawati Abubakar, S.E., MM


Ahmad Jumarding, S.E., MM

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Fahira

Nim : 4518012177

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Peran *Good Corporate Governance* Dalam Peningkatan Kinerja Keuangan Pada PT Bank Sulselbar Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya dan karya ilmiah saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 22 Juli 2022
Mahasiswa Yang
Bersangkutan



Dian Fahira

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dan taklupa pula shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Peran *Good Corporate Governance* Dalam Peningkatan Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Makassar” dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis alami. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak terutama pembimbing, hambatan tersebut dapat teratasi. Pada kesempatan dan melalui lembaran ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Pertama-tama ucapan terimakasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.SI.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abubakar, S.E., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Bapak Ahmad Jumarding, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., M.H. selaku pembimbing I terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis dalam pengambilan gelar sarjana.
5. Bapak Dr. Ir. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., S.E., MM., IPU. selaku pembimbing II terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk

membimbing, memberi motivasi, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis dalam pengambilan gelar sarjana.

6. Kepada Kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda Faisal Syukur dan Ibunda Hasnawati atas kasih sayang dan semangat yang tiada henti, segala cucuran keringat, air mata, serta pengorbanan yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai di titik sekarang ini. Semoga rahmat Allah SWT dan keselamatan dunia akhirat senantiasa utukmu.
7. Untuk Mulia Aqsha Yusuf S.E atas dukungan, bantuan, dan perhatian yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Untuk sahabat Lulu Marjania atas perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Untuk teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat Saskia Erviana, Aswini, Nur Afni, Hilma Lutfiah, Ainul Muftiyah, dan Sarah atas semangat, bantuan, hiburan dan telah menjadi teman baik selama kuliah.

**PERAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM PENINGKATAN KINERJA
KEUANGAN PADA PT. BANK
SULSELBAR MAKASSAR**

Oleh :

Dian Fahira

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa

ABSTRAK

Dian Fahira 2022 Skripsi Peran *Good Corporate Governance* Dalam Peningkatan Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Makassar di Sulawesi Selatan Yang Telah Dibimbing Oleh Dr.H.A.Arifuddin Manne, S.E., M.Si.,S.H.,M.H dan Dr.Ir.Lukman Setiawan,S.Si.,S.Psi.,S.E.,MM.,IPU.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran Good Corporate Governance dalam peningkatan kinerja keuangan pada PT. Bank Sulselbar Makassar dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Good Corporate Governance.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sulselbar Makassar telah menjalankan dengan baik prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Good Corporate Governance seperti prinsip Transparency dan Fairness telah menjalankan prinsip keterbukaan serta kewajaran dalam pemberi informasi secara adil dan baik didalam melaksanakan tata kelola perusahaan pada Bank Sulselbar Makassar.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan

**ROLE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN
PERFORMANCE IMPROVEMENT**

**FINANCE AT PT. BANK
SULSELBAR MAKASSAR**

Arranged by :

Dian Fahira

**Management Study Program, Faculty of Economics and Business Bosowa
University**

ABSTRACT

Dian Fahira 2022 Thesis The Role of Good Corporate Governance in Improving Financial Performance at PT. Bank Sulsebar Makassar in South Sulawesi Which Has Been Supervised By Dr.H.A.Arifuddin Manne, S.E., M.Si.,S.H.,M.H and Dr.Ir.Lukman Setiawan,S.Si.,S.Psi.,S.E.,MM.,IPU .

The purpose of the study was to find out how the role of Good Corporate Governance in improving financial performance at PT. Bank Sulsebar Makassar by using the basic principles contained in Good Corporate Governance.

The results of the study indicate that Bank Sulsebar Makassar has carried out well the basic principles contained in Good Corporate Governance such as the principles of Transparency and Justice have implemented the principles and provided information fairly and well in implementing corporate governance at Bank Sulsebar Makassar.

Keywords : *Good Corporate Governance, Financial*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kerangka teori	8
2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan	9
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja Keuangan.. ..	12
2.1.3 Konsep Kinerja Keuangan.....	12
2.1.4 Pengertian Kesehatan Bank.....	13
2.1.5 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.....	16
2.1.6 Good Corporate Governance.....	18
2.2 Kerangka Pikir.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Tempat dan Waktu penelitian	26
3.2 Jenis Dan Sumber Data	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	27
3.4 Teknik Analisis Data	27
3.5 Definisi Operasional.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Deskripsi Gambaran Umum Perusahaan	30
4.1.1 Sejarah Singkat.....	30
4.1.2 Visi Dan Misi Perusahaan	32
4.1.3 Struktur Organisasi.....	35
4.1.4 Tagline Perusahaan.....	35
4.2 Hasil Penelitian.....	36
4.2.1 Analisis <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	36
4.2.2 Hasil Wawancara.....	43
4.3 Pembahasan	49
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada waktu tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan. Aktivitas-aktivitas ini dicatat dan dirangkum menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai media untuk melaporkan keadaan dan posisi perusahaan pada pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak kreditur, investor, dan manajemen perusahaan itu sendiri (Aminatuzzahra, 2010).

Informasi yang disajikan dengan benar dalam suatu laporan keuangan, akan sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Untuk menggali lebih banyak lagi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, diperlukan suatu analisis laporan keuangan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang disebut rasio. Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan (Riyanto (1992: 329) dalam Liora (2014). Analisis laporan keuangan memprediksikan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga disinilah laporan keuangan tersebut begitu diperlukan (Azhari, 2014).

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kinerja keuangan, kinerja keuangan merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, sehingga salah satu informasi yang bisa diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau para pengguna laporan keuangan ialah profitabilitas perusahaan untuk mengetahui seberapa besar laba perusahaan.

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa laba yang dimiliki bertumbuh. Penelitian terhadap salah satu perusahaan menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut dapat mencapai pertumbuhan laba yang tinggi dalam setengah tahun pertama. Perusahaan tersebut memiliki proses internal yang sama kuat dengan kemampuannya untuk menarik pelanggan dan mengimplementasi strategi internasional dengan cepat. Dengan kemampuan strategi tersebut, perusahaan mencapai pertumbuhan laba yang diinginkan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan value added untuk semua stakeholder. *Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor.

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global. Salah satu manfaat dari pelaksanaan *corporate governance*, yang sesuai dengan *Forum for Corporate Governance* Indonesia (FCGI) adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Oleh karena itu sebagian besar perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* diduga memiliki kinerja yang lebih baik daripada kinerja perusahaan yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance*, baik dari segi operasional maupun kinerja keuangan.

Menurut kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi system tata kelola perusahaan atau biasa dikenal dengan corporate governance merupakan salah satu penentu faktor parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (*The World Bank*, 198, dalam Oktapiyani, 2009). Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan. Penerapan corporate governance juga menjadi permasalahan penting dalam dunia perbankan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Caprio dan Levine (2002), terdapat dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate governance*. Pertama, bank merupakan sektor yang tidak-transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme *corporate governance*.

Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengarahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke investor, berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasannya.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No.67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar

Penilaian kesehatan dilakukan dengan menggunakan hasil dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh bank. Laporan keuangan merupakan media informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan pada perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan tingkat kesehatan keuangan dan kinerja dalam operasional perusahaan. Laporan keuangan diperlukan setiap perusahaan untuk bisa melakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai perusahaan. Laporan keuangan sebagai alat komunikasi bagi pihak yang terkait dalam perusahaan. Menurut penjelasan atas peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Pasal 2 Ayat , menjelaskan bahwa Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga.

Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa corrective action oleh Bank maupun supervisory action oleh Bank Indonesia. Khususnya bagi para stakeholder atau pihak ketiga, adanya penilaian tingkat kesehatan bank akan memberi sinyal dalam pengambilan keputusan dalam menipkan dana mereka pada Bank.

Mengingat pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka penilaian mengenai tingkat kesehatan bank harus terus dilakukan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu kunci sukses dalam mendorong kemajuan perusahaan perbankan. Mengingat fungsi, posisi dan peranan Bank Sulselbar di tengah-tengah masyarakat yang begitu strategis, maka kepentingan akan pengukuran tingkat kesehatannya menjadi begitu penting agar dikemudian hari Bank Sulselbar lebih dapat diterima oleh masyarakat dan tetap di percaya oleh kalangan pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan keuangan bisnisnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran *Good Corporate Governance* dalam peningkatan kinerja keuangan pada PT BANK SULSELBAR MAKASSAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sbb :

“Bagaimana peran *Good Corporate Governance* dalam peningkatan kinerja keuangan pada PT. Bank Sulselbar Makassar pada tahun 2017-2019.”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana peran *Good Corporate Governance* dalam peningkatan kinerja keuangan pada PT. Bank Sulselbar Makassar pada tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan dalam perkembangan ilmu ekonomi secara luas dan dalam bidang peran *Good Corporate Governance* dalam peningkatan kinerja keuangan secara khusus
- b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta saran sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya
- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan terkait kinerja keuangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG / penerapan GCG, maka pengelolaan sumberdaya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan *stakeholders approach*.

Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable.

Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, director, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menimbulkan masalah agensi (*agency conflict*). GCG yang diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan. Penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan dapat memberikan jaminan kepada pihak investor bahwa dana yang telah diinvestasikan dikelola secara efisien. Selain itu, dengan GCG, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (agen) bertindak yang terbaik bagi kepentingan perusahaan (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2007 dalam Pranata, 2007). Dengan demikian, GCG diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan

melalui supervisi kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (agen) dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

GCG yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Perusahaan yang mampu meningkatkan kinerja, berarti perusahaan tersebut dapat menunjukkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan dana yang diperoleh dari pemilik, serta seberapa efektif perusahaan menggunakan dana yang berasal dari sumber-sumber lain untuk kepentingan pemilik. Penerapan GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (Pedoman GCG 2006).

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dimana kekuatan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan, sedangkan kelemahan itu digunakan sebagai tolak ukur agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Dengan mengadakan perbandingan kinerja perusahaan terhadap standar yang ditetapkan atau dengan periode-periode sebelumnya maka akan dapat diketahui apakah suatu perusahaan mencapai kemajuan atau sebaliknya, yaitu mengalami kemunduran.

Laba Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003:6) pengertian kinerja keuangan adalah “penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba”.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar menurut Irham Fahmi (2014). Kinerja Keuangan adalah

prestasi atau keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh. Hal ini menyatakan bahwa Kinerja Keuangan merupakan prestasi keuangan yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu.

Menurut Fahmi (2012:132) dalam Arifuddin Mane (2019) Kinerja Keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar.

Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan maka secara umum perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan, yang menurut Brigham dan Houston (2007:78) mencakup (1) perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan (2) evaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Laporan keuangan perusahaan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja atau *performance* adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Hasil pekerjaan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan strategis organisasi serta pada aspek kepuasan pelanggan/konsumen. Kinerja dapat berarti output yang dihasilkan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. “Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu” (Wirawan, 2009: 5). Sedangkan menurut Srimindarti, Ed

(2004: 53) “Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.

2.1.2 Tujuan Dan Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2010:31), pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.
4. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan

Sedangkan menurut Rusmanto (2011:621) dalam Ridhawati (2014) pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi yang berguna dalam keputusan penting mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan
2. Mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas usaha
3. Hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan.

2.1.3 Konsep Kinerja Keuangan

Produktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai kemampuannya untuk memberikan nilai lebih terhadap perusahaan adalah kinerja perusahaan. Penilaian kinerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan *go public*, karena perusahaan *go public* berarti perusahaan yang dimiliki oleh publik/masyarakat sehingga dituntut untuk mampu meningkatkan kinerjanya. Penilaian kinerja juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan, penilaian kinerja juga sangat berguna untuk restrukturisasi pengimplementasian program pemulihan usaha, bagi perusahaan yang *go public* penilaian kinerja sangat penting jika perusahaan akan menjual perusahaannya kepada umum (di bursa) harus melakukan penilaian untuk menentukan nilai wajar saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pengukuran kinerja perusahaan adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan perusahaan, yang akan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau suatu proses penilaian kegiatan operasional perusahaan berupa tindakan dan aktivitas suatu organisasi pada periode tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja adalah penilaian tingkat efektifitas dan efisiensi dari aktivitas organisasi.

2.1.4 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006:51). Secara lebih luas kesehatan bank mencakup aspek-aspek dalam kegiatan perbankan yang meliputi kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, serta modal sendiri, kedua kemampuan mengelola dana, ketiga kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, keempat kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain, dan terakhir pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank juga merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank.

Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari inilah yang berfungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga. Menurut Sudarsono (2007: 29) dalam Arifuddin Mane (2020) Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut OJK (2014) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sudarsono (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Ada banyak pendapat yang mendefinisikan tentang perbankan syariah dan semua definisi tersebut mengacu pada konsep dan isi Al-Qur'an, Hadist, Qyas dan Ijma' para ulama.

2.1.5 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan atau kondisi keuangan dan nonkeuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank pemerintah (melalui Bank Indonesia) dan pengguna jasa bank. Dengan diketahuinya kondisi suatu bank dapat digunakan

oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank. Perubahan eksposur risiko bank dan penerapan manajemen risiko akan memengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan.

Penilaian kesehatan bank adalah muara akhir atau hasil dari aspek pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional. Berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi serta komprehensif dan terstruktur merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan manajemen bank dalam menilai tingkat kesehatan bank (SE BI No. 13/24/DPNP). Penilaian tingkat kesehatan bank umum yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 dimana bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Bagi investor penilaian dan informasi kesehatan bank menjadi bagian penting yang menggambarkan kondisi kesehatan bank tersebut. Jika bank tersebut baik maka akan memberi sinyal positif, namun jika kondisinya tidak baik akan memberi sinyal negatif. Sinyal negatif jelas akan menurunkan reputasi bank tersebut di mata investor.

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum secara individual mencakup penilaian terhadap faktor-faktor meliputi profil Risiko, GCG, rentabilitas, dan permodal yang biasa disingkat “RGEC”. Peraturan Bank Indonesia No.13/PBI/2011 mengacu pada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.14/SEOJK.03/2017 menjelaskan bahwa dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum manajemen bank perlu memperhatikan prinsip umum

sebagai landasan dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank didasarkan pada Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan pada masa datang. Dengan demikian, Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.

Di samping itu Bank dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.

3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu profil risiko, Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam

menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

2.1.6 Good Corporate Governance

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Good Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Menurut keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-177/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) demi

tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dibuat untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan antara hubungan tersebut.

Good Corporate Governance dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Praktik ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pedoman umum *Good Corporate Governance* bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan dalam menjalankan bisnis secara baik.

Terdapat lima prinsip utama yang penting dalam *Good Corporate Governance* yaitu :

1. Keadilan (*Fairness*)
2. Transparansi (*Transparency*)
3. Kemandirian (*Independency*)
4. Akuntabilitas (*Accountability*)
5. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Mekanisme *Good Corporate Governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Diyanti 2010). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal. Kurnianingsih dan Supomo (1999) juga menjelaskan bahwa komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan dapat melaksanakan beberapa fungsi yaitu: menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan; menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi; menelaah efektifitas Struktur Pengendalian Internal (SPI) dan memastikan tingkat kepatuhan SPI; mengevaluasi kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan; menilai estimasi, kebijakan dan penilaian manajemen yang dipertimbangkan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen, yang dapat diukur dari presentase saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentase saham biasa dan atau opsi saham yang dimiliki direktur dan *officer*. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena bila terdapat keputusan yang salah manajemen juga akan menanggung konsekuensinya.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan

pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Menurut penulis, implementasi prinsip GCG tidak terlepas dengan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance (GGG)). Di era globalisasi tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good governance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik³⁰. Jika kondisi good governance dapat dicapai maka negara yang bersih dan responsif (clean and responsive state) akan terwujud, semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab bukan merupakan impian lagi.

Kelemahan yang sangat mencolok dalam proses tercapainya good governance selama ini adalah tingginya korupsi yang terjadi. Korupsi dapat dikatakan merajelala terutama dikalangan birokrasi pada institusi publik atau lembaga pemerintah baik departemen maupun lembaga bukan departemen serta lembaga BUMN/D. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya untuk menegakkan paradigma good governance. Paradigma Good Governance berjalan seiring dengan paradigma good corporate governance. Keberhasilan menerapkan GCG, apabila GGG juga berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sepanjang GGG tidak terwujud, maka tata kelola perusahaan yang baik juga tidak akan terwujud.

Berdasarkan pembahasan di atas, terjadinya kondisi tersebut lantaran GCG belum membudaya di Indonesia³¹, hal ini senada dengan pendapat Pontas R. Siahaan bahwa di Indonesia konsep GCG baru pada tahap pengenalan (setting), padahal GCG berhubungan juga dengan fungsi monitoring atau implementasi secara terus menerus, apa-apa yang harus diperbaiki terhadap setting yang telah dibuat, sehingga nantinya akan terbangun model GCG yang sesuai dengan kondisi yang akan berdampak kepada penguatan kinerja. Kemudian, tahap berikutnya adalah tahap performance yaitu mengukur kinerja yang dihasilkan dari

persiapan GCG ini, dan yang perlu diingat tidak ada single universal corporate governance model. Praktik GCG yang dibangun haruslah yang sesuai dengan kultur sosial dan budaya Indonesia

Dalam kaitan dengan pembangunan perekonomian, sektor korporasi yang mampu berperan positif bagi pembangunan ekonomi adalah sector korporasi yang merupakan aset nasional dan bukan mereka yang hanya menjadi beban dan parasit masyarakat. Kelompok korporasi ini adalah kelompok yang patuh dengan prinsip-prinsip GCG, taat pada aturan main dan peraturan yang berlaku, dengan kata lain adalah mereka yang mampu mempraktikkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu, dalam kehidupan berbisnis saat ini GCG harus merupakan komitmen, Tanpa adanya komitmen yang tinggi dari pelaku bisnis, pemerintah dan masyarakat umum, maka sulit untuk mewujudkan GCG. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan pedoman GCG yang mengikat semua pihak.

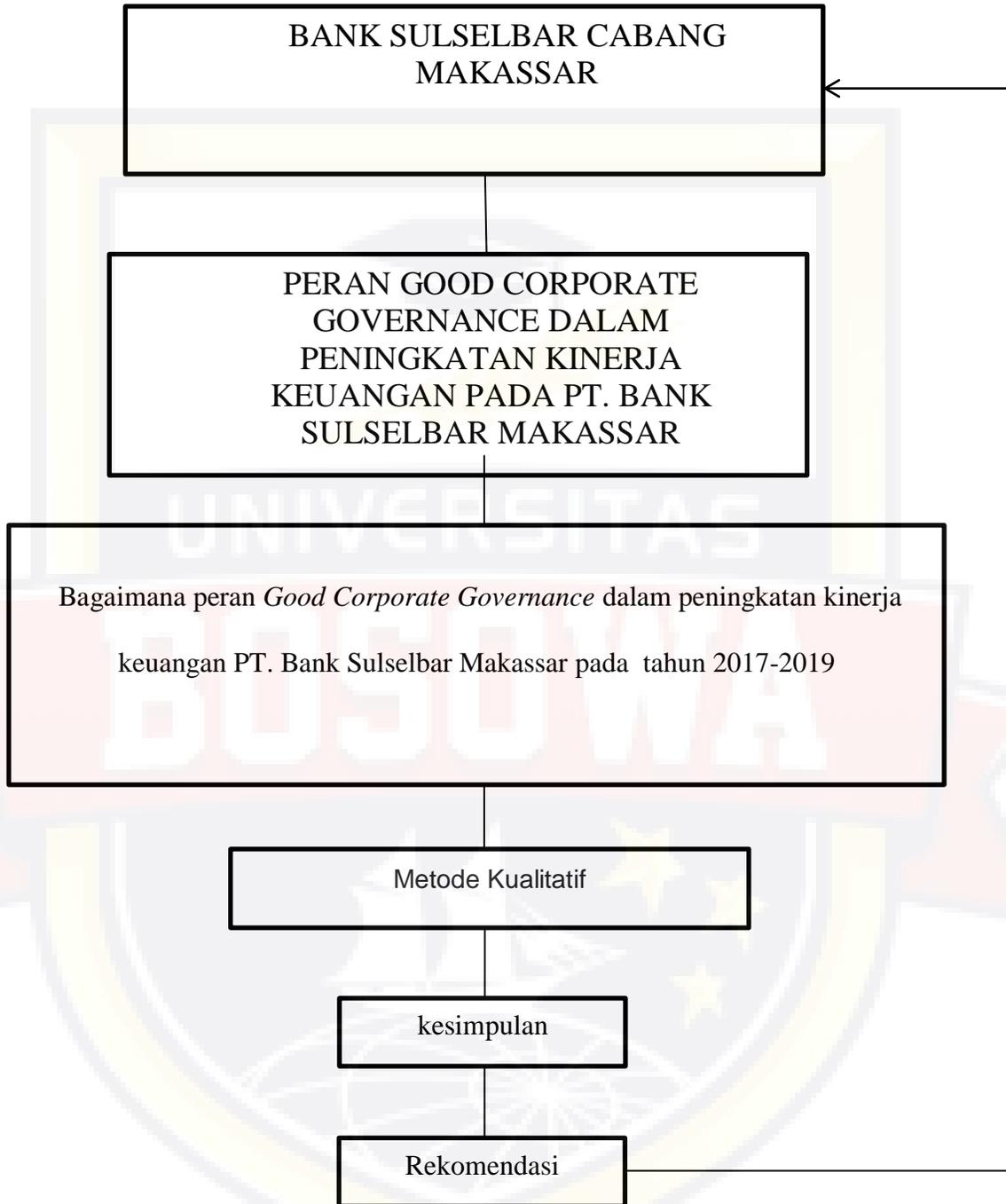
GCG harus dianggap sebagai aset yang tidak berujud yang akan memberikan hasil balik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah perusahaan dan GCG juga sebagai way of life atau kultur perusahaan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan serta pedoman perilaku manajemen. Oleh karena itu, ke depan setiap bidang atau sektor akan menerbitkan Pedoman GCG yang bersifat voluntary dan harus memuat hal pokok tentang kewajiban pemenuhannya bersifat “mandatory” dan juga dimasukan system reward and punishment seperti yang diterapkan di negara Malaysia.

Berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Internasional maupun nasional bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip GCG yang relatif terendah dibandingkan negara-negara lain. Kendala yang sangat besar yang dihadapi dalam penerapan prinsip GCG saat ini di Indonesia adalah praktik korupsi, pengelembungan biaya, kolusi serta nepotisme masih tumbuh subur dan terus dipupuk dibanyak badan pemerintahan, perusahaan swata maupun BUMN/D dan belum membudayanya prinsip GCG.

Salah satu indikator keberhasilan implementasi GCG adalah kelengkapan aturan hukum di bidang bisnis. Disamping adanya komitmen. Tanpa adanya komitmen yang tinggi yang dimiliki pelaku bisnis, pemerintah dan masyarakat umum, maka sulit untuk mewujudkan GCG dan GCG sulit dimulai jika pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya masih bersikap skeptis.

Sikap yang perlu dikembangkan terhadap pentaatan terhadap GCG adalah regulatory driven bukan dorongan professional driven dan ethic driven. GCG harus dianggap sebagai aset yang tidak berujud yang akan memberikan hasil balik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah perusahaan dan GCG juga sebagai way of life atau kultur perusahaan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan serta pedoman perilaku manajemen

2.2 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini pada PT Bank Sulselbar Cabang Makassar dilakukan dengan menggunakan data publikasi dari *website* www.idx.co.id, *website* Bank Indonesia (BI) www.bi.go.id, *website* perusahaan terkait banksulselbar.co.id dan Waktu penelitian berlangsung pada bulan Maret sampai dengan Mei 2022.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai situs terakhir dari subjek penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara ataupun observasi.

b. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer bersumber dari data yang dikumpulkan, diolah, diterbitkan sendiri oleh organisasi atau perusahaan yang menggunakannya. Data yang digunakan oleh peneliti adalah hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Sumber tersebut diperoleh dari orang lain dan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan

perusahaan. Data yang digunakan oleh penulis berupa dokumen yang terkait dengan informasi perusahaan serta laporan dari hasil observasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Interview

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung atau wawancara lepas dengan pejabat yang berwenang yaitu bagian AMBM (Asisten Manajemen Bisnis Makro) yang ada kaitannya dengan variabel-variabel pada Bank Sulselbar Cabang Makassar. Peneliti menginginkan informasi mengenai bagaimana perusahaan menetapkan strategi apa yang dilakukan untuk menguasai pangsa pasar besar, mencapai laba yang maksimal.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis data yaitu:

1. Analisis Kualitatif

Proses analisa data dimulai dengan seluruh data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, dari pencatatan yang ada di lapangan, peneliti mengumpulkan data-data perusahaan dari hasil wawancara dan observasi.

Langkah lanjutan kategori disusun atas dasar pemikiran, institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Peneliti mengkategorikan kesimpulan-kesimpulan

2. Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Indikator penilaian pada *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank

Indonesia menurut Peraturan bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. *Good Corporate Governance* diukur dengan melihat *Good Corporate Governance*:

Tabel 3.1 kriteria penetapan peringkat

Peringkat	Keterangan
1	Sangat baik
2	Baik
3	Cukup baik
4	Kurang baik
5	Tidak baik

Sumber : (Lampiran SEBI No 6/23/DNDP) 2011

3.5 Defenisi Oprasional

1. Bank

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat

2. *Good Corporate Governance*

Pengertian *good corporate governance* menurut Bank Dunia (World Bank) adalah sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyakuran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profibilitas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI berdasarkan surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

Pada Tahun 2009, Bank Sulselbar telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (Bank Devisa) dan mencatatkan Bank Sulselbar

sebagai Bank BPD Pertama dan satu-satunya yang beroperasi sebagai Bank Devisa di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-197/D.03/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang ditetapkan di Jakarta.

4.1.2 Visi Dan Misi Perusahaan

VISI

Menjadi Indonesia Bank Kebanggaan dan Terkemuka untuk Membangun Kawasan Timur

ARTI VISI

1. Bank Kebanggaan: Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi bank pilihan utama baik bagi masyarakat Sulselbar maupun di wilayah lain di Kawasan Timur Indonesia. Rasa bangga itu ditumbuhkan dari kemampuan Bank Sulselbar untuk mampu aktif Membangun Kawasan Timur Indonesia.
2. Terkemuka: Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi bank yang kuat (memiliki permodalan yang tangguh), berdaya saing, dan menjadi bank yang dapat diandalkan oleh Pemda untuk pembangunan daerah.
3. Membangun Kawasan Timur Indonesia : Bank Sulselbar berkeinginan untuk menyediakan layanan dan jasa perbankan yang berkualitas di Kawasan Timur Indonesia serta turut berkontribusi aktif dalam pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

MISI

1. Memberikan solusi jasa keuangan yang inovatif kepada pemerintah dan

masyarakat berdasarkan layanan prima dan prinsip kehati-hatian.

2. Mitra strategis Pemda dalam pembangunan daerah.
3. Mitra utama bagi UMKM untuk mengerakkan kesinambungan

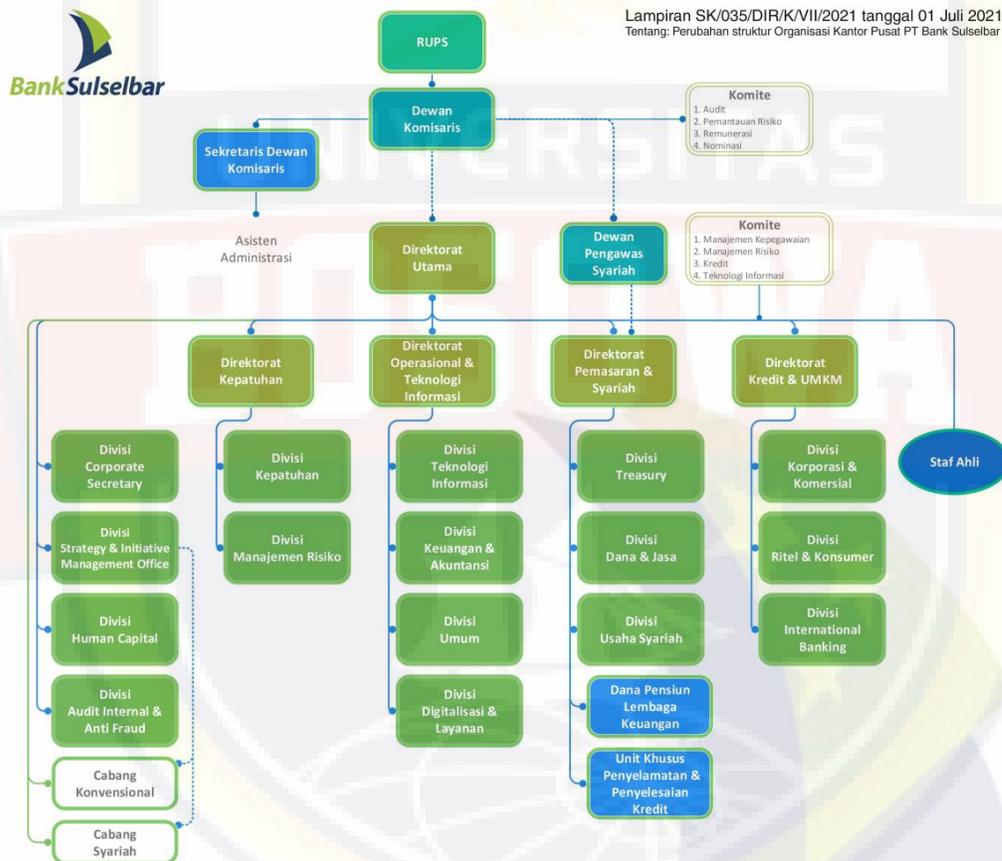
ARTI MISI

1. Memberikan solusi jasa keuangan yang inovatif kepada pemerintah dan masyarakat berlandaskan Layanan Prima dan Prinsip kehati-hatian.
 - Bank Sulselbar senantiasa berinovasi terhadap solusi keuangan yang diberikan melalui digitalisasi produk dan jasa yang bersifat komprehensif, yakni dapat tersedia dalam platform yang sama, sehingga nasanagh dapat menikmati beragam produk dan jasa dengan cara yang intuitif dan memudahkan (hassle-free).
 - Bank Sulselbar senantiasa berinovasi terhadap solusi keuangan yang diberikan melalui digitalisasi produk dan jasa yang bersifat komprehensif, yakni dapat tersedia dalam platform yang sama, sehingga nasanagh dapat menikmati beragam produk dan jasa dengan cara yang intuitif dan memudahkan (hassle-free).
2. Mitra strategis Pemda dalam pembangunan daerah.
 - Bank Sulselbar berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan berbagai bentuk, yakni sebagai sumber pendapatan asli daerah, menjadi pihak ketiga yang memfasilitasi pelaksanaan transaksi keuangan, dan juga memfasilitasi pendanaan untuk proses ekspor dan impor.
 - Bank Sulselbar juga memiliki mandat untuk mendukung bisnis yang ramah terhadap lingkungan, serta terlibat dalam program tanggung jawab sosial yang sejalan dengan program Pemda.

3. Mitra utama bagi UMKM untuk menggerakkan kesinambungan sektor riil.

Bank Sulselbar fokus untuk turut menjadikan UMKM sebagai salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggerakkan sektor riil secara berkesinambungan.

4.1.3 Struktur Organisasi



4.1.4 Tagline Perusahaan

Melayani Sepenuh Hati

Bank Sulselbar berkeinginan untuk senantiasa memberikan layanan prima kepada

nasabah melalui layanan yang ramah dan berempati dengan tetap mengedepankan profesionalisme yaitu layanan yang akurat, responsif, memberikan solusi dan aman. Layanan personal kepada nasabah diimbangi pula dengan penyediaan produk dan layanan berbasis teknologi terkini untuk memberikan service experience terbaik bagi nasabah.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis *Good Corporate Governance* (GCG)

Indikator penilain pada Good Corporate Governance (GCG) yaitu prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governance yaitu :

1. Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sitem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian yang mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada *stakeholder*.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain.

Pedoman pokoknya adalah :

- a. Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
- b. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem reward and punishment.
- e. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3. Tanggung Jawab

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha

jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

Pedoman pokok prinsip ini adalah:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.
- b. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

4. Independensi

Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari conflict of interest dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dan tidak saling melempar tanggung jawab.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

- a. Pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup

kedudukan masing-masing.

- b. Perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, gender, dan kondisi fisik.

Berdasarkan berbagai definisi GCG yang disampaikan di atas dapat diketahui ada lima macam tujuan utama *Good Corporate Governance* yaitu:

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the *stakeholders* nonpemegang saham.
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan
- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directorss* dengan manajemen senior perusahaan

Kelima tujuan utama GCG menunjukkan isyarat bagaimana penting hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik

Untuk menciptakan tujuan tersebut diperlukan GCG. GCG dapat dimakna-kan sebagai rangkaian mekanisme dengan apa suatu perusahaan publik diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan harapan para *stakeholders*. Mekanisme tersebut merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan dan menetapkan distribusi hak dan tanggungjawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan.

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal, bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal, tetapi terutama bahwa pengelolaan yang baik itu dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang berkepentingan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa taruhannya di perusahaan publik adalah suatu keputusan yang benar.

0Menurut KNKG perusahaan yang telah memberikan respon mereka dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik *corporate governance* yang lebih baik tidak menempatkan penerapan GCG sebagai tujuan akhir, akan tetapi perusahaan menyadari bahwa hal tersebut sangat penting untuk mencapai :

- a. Peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien dan pemberian layanan yang lebih baik.
- b. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi- teknologi baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, yang akan mengikatkan nilai perusahaan.
- c. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan dividen dan nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat.
- d. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*.
- e. Sumber pendapatan Pemerintah melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran dividen dan pajak oleh BUMN.

Selain itu, *Corporate Governance* yang baik diakui dapat membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal *corporate governance* yang baik telah terbukti meningkatkan kinerja perusahaan sampai 30% di atas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal, oleh karena itu, *Corporate Governance* yang baik memberikan manfaat pada perbaikan dalam komunikasi, minimisasi potensi benturan, fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, kesinambungan manfaat (*sustainability of benefit*), promosi citra perusahaan (*corporate image*), peningkatan kepuasan pelanggan, dan peroleh kepercayaan investor.

Indikator penilaian pada *Good Corporate Governance* yaitu juga menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. *Good Corporate Governance* diukur dengan melihat *Corporate Governance Index Perception* (CGPI). CGPI merupakan program riset dan peningkatan GCG yang memberikan penilaian kualitas *Corporate Governance* di Perusahaan.

.Prinsip	2017	2018	2019
Hak-hak pemegang saham	8.80	8.80	8.80
Perlakuan setara terhadap pemegang saham	12.50	12.50	12.50
Peran pemangku kepentingan	10.00	10.00	10.00
Pengungkapan dan transparansi	24.39	24.39	24.39
Tanggung jawab direksi dan komisaris	37.89	37.89	37.89
Bonus	7.00	9.00	6.00
Penalty	(2.00)	0	0

Skor ACGS	88.55	102.05	99.53
-----------	-------	--------	-------

Sumber: *Corporate Governance index perception (CGPI), 2020*

Berdasarkan hasil pemeringkatan CGPI yang dilakukan oleh lembaga IICG pada laporan tahunan tata Kelola perusahaan PT. Bank Sulselbar Makassar. Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 *Good Corporate Governance (GCG)* mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Ditahun 2017 sebesar 88,55%, ditahun 2018 sebesar 102,05%, dan ditahun 2019 sebesar 99,53% dan memperoleh predikat sangat terpercaya. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 PT. Bank Sulselbar Makassar melakukan manajemen yang baik dan mengikuti prinsip- prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia.

4.2.2 Hasil Wawancara

Data Informan

Inisial Nama	Asal Perusahaan
M.V	Bank Sulselbar Makassar
A.S.Y	Bank Sulselbar Makassar
Y.A	Bank Sulselbar Makassar

Transkrip Wawancara

DRAFT PERTANYAAN :

Naraumber 1 Nama : M.V

Asal Perusahaan : Bank Sulselbar Makassar

<i>Tranparency</i>	
T	Apakah informasi pada perusahaan diberikan secara terbuka kepada karyawan?
J	Iya, kan kalau gak dikasih secara terbuka nanti karyawannya gak ngerti kondisi perusahaan gimana
T	Informasi apa saja yang diberikan secara terbuka?
J	seperti informasi visi dan misi perusahaan, peraturan perusahaan, target perusahaan, dan masih banyak lagi
T	Informasi peraturan perusahaan dan target perusahaan yang seperti apa?
J	Peraturannya itu misalnya tentang jam masuk kerja, terus kalo target ya target perusahaan jangka panjang misalnya memasuki pasar indonesia bagian timur.
T	Apakah perusahaan juga memberikan informasi laporan keuangan kepada pemangku kepentingan? atau <i>stakeholders</i> ?
J	Iya misalnya konsultan pajak
T	Kenapa perusahaan memberikan informasi laporan keuangan kepada konsultan pajak?
J	Untuk hitung keuangan perusahaan

T	Apakah karyawan mengetahui visi dan misi, peraturan perusahaan, serta target perusahaan?
J	Iya tau
Accountability	
T	<p>Apa perusahaan punya sistem pengendalian internal? Seperti struktur organisasi dan rincian tugas dan tanggung jawab organ perusahaan, dan audit?</p>
J	Iya ada
T	Bagaimana penyusunan struktur organisasi di perusahaan?
J	Pembentukan struktur perusahaan berdasarkan kebutuhan
T	Maksudnya berdasarkan kebutuhan itu seperti apa?
J	Ya berdasarkan karyawan yang dibutuhkan perusahaan misalnya di perusahaan kan cuma ada divisi keuangan, <i>customer service</i> , <i>marketing</i> , sama operasional gudang sedangkan untuk divisi produksi di perusahaan gak ada karena kita kan tidak memproduksi barang cuma mendistribusikan jadi perusahaan tidak membutuhkan divisi produksi
T	Bagaimana rincian tugas dan tanggungjawab organ perusahaan dan karyawan biar jelas dan sesuai dengan nilai perusahaan serta strategi perusahaan?
J	Itu ada <i>job description</i> sama ada SOP juga
T	Bagaimana penyampaian SOP dan <i>job description</i> ?
J	Kalau SOP divisi secara lisan sedangkan <i>job description</i> secara tertulis dan lisan
T	Apakah karyawan tau tugas dan tanggung jawabnya masing – masing?
J	Iya tau, tiap karyawan tau apa yang harus dikerjakan terus tau juga harus melapor kemana

T	Kalau ternyata pada saat menjalankan tugas dan terjadi kesalahan apakah pemimpin mengetahui siapa yang bertanggungjawab?
J	Iya kan ada laporan yang dibuat per-bagian
T	Laporan per bagian seperti apa?
J	Misalnya bagian gudang memberikan laporan mengenai kerusakan barang, keuangan memberikan laporan arus kas, dll
T	Apa tindakan atas kesalahan tersebut?
J	Ya diberikan peneguran secara langsung

Responsibility	
T	Apakah perusahaan sudah melakukan CSR terhadap lingkungan?
J	Untuk saat ini belum ada
T	Kenapa perusahaan belum melakukan CSR terhadap lingkungan?
J	Perusahaan tidak menghasilkan limbah yang mengganggu lingkungan sekitar
T	Bagaimana CSR perusahaan terhadap masyarakat?
J	Untuk saat ini CSR terhadap masyarakat hanya berupa tindakan untuk tidak mencemari lingkungan, untuk pemberian dana bantuan dan sebagainya belum dilakukan perusahaan
T	Bagaimana sistem pengupahan pada perusahaan?apakah sesuai dengan upah minimum?
J	Upah setiap karyawan berdasarkan upah minimum, bahkan ada karyawan yang upahnya di atas upah minimum dan akan naik secara berkala setiap tahunnya sesuai dengan kinerja mereka

<i>Independency</i>	
T	Apakah setiap keputusan selalu dilakukan oleh pemegang saham terbesar?
J	Iya, tapi itu berdasarkan diskusi dengan pemegang saham yang lain juga waktu rapat
T	Oh berarti RUPS pada perusahaan sudah dilakukan?
J	Iya sudah selain RUPS tahunan perusahaan juga melakukan RUPS apabila ada keputusan yang mendesak misalnya kalau mau ganti susunan komisaris
T	Apakah ada perbedaan pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam mengikuti rapat?
J	Gak ada, semua pemegang saham tidak dibedakan dalam mengikuti rapat
T	Apa tujuan perusahaan dalam melakukan rapat pemegang saham?
J	Biar keputusan bersifat objektif dan tidak berdasarkan keputusan satu pihak
T	Bagaimana pembagian keuntungan untuk pemegang saham?
J	Pembagiannya berdasarkan dividen terus dibagi berdasarkan saham yang dimiliki
T	Apakah perusahaan pernah mendapat tekanan dari pemegang saham?
J	Gak ada
T	Apakah ada regulasi pemerintah yang berdampak secara langsung terhadap kinerja perusahaan?
J	Untuk saat ini belum berdampak secara langsung cuma berupa kontribusi untuk kebijakan dalam sistem perusahaan aja
T	Kontribusi seperti apa?contohnya?
J	seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya mengenai kebijakan gaji karyawan, terus kompensasi bonus, uang cuti, uang makan, kelangsungan

	pekerjaan, kondisi lingkungan kerja, dan lain – lain.
T	Apakah ada LSM yang mengganggu perusahaan? seperti demo buruh yang sedang ramai dibicarakan?
J	Tidak ada
T	Apakah perusahaan menggunakan jasa konsultan?
J	Iya
T	Jasa konsultan apa yang digunakan perusahaan?
J	Jasa konsultan pajak, tapi bukan pekerja tetap beliau hanya ada ketika perusahaan ingin menghitung pajak perusahaan

<i>Fairness</i>	
T	Apakah setiap pemangku kepentingan mempunyai hak untuk memberikan pendapat?
J	Iya, selama semua masukan yang disampaikan berhubungan dengan kepentingan perusahaan
T	Apakah rapat pemegang saham selalu diikuti oleh semua pemegang saham?
J	Iya kan itu wajib
T	Apa hak pemegang saham?
J	Menerima laporan keuangan dan performa perusahaan dalam 1 tahun dan memberikan pendapat,
T	Apakah ada perlakuan berbeda terhadap gender karyawan?
J	Gak ada

Narasumber 2

Nama : A.S.Y

Asal Perusahaan : Bank Sulselbar Makassar

<i>Transparency</i>	
T	Apakah informasi pada perusahaan diberikan secara terbuka kepada karyawan?
J	Iya dikasih kok
T	Informasi apa saja yang diberikan secara terbuka?
J	Pas rapat
T	Apa ada evaluasi kebijakan?
J	Ada
T	Bagaimana evaluasinya?
J	Karyawan dikumpulin sebulan sekali terus cerita masalah – masalah yang dihadapi, habis itu diadakan rapat lagi untuk nilai kebijakannya perlu diubah lagi apa gak.
T	Apa ada ukuran dalam pengambilan kebijakan?
J	Kebijakannya itu berdasarkan kepentingan karyawan sama perusahaan
T	Kebijakan apa yang diambil perusahaan berdasarkan kepentingan karyawan?
J	Misalnya perusahaan ada sediain memo buat karyawan nah memo itu buat tulis apa saja yang mau disampein pada rapat setiap minggu
T	Bagaimana kebijakan perusahaan tentang susunan kompensasi karyawan?
J	Kebijakan kompensasi dibuat transparan
T	Kompensasinya dibuat transparan seperti apa?

J	Maksudnya tiap karyawan tau kompensasi karyawan yang lain
T	Susunan kompensasi seperti apa aja?
J	Misalnya gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan masa kerja dan tunjangan absensi
T	Apa alasan perusahaan melakukan transparansi tersebut?
J	Ya kan ada perbedaan kompensasi karyawan jadi biar gak ada kecemburuan antar karyawan
T	Kenapa ada perbedaan kompensasi karyawan?
J	Ada perbedaan jabatan dan kemampuan karyawan juga beda – beda

Accountability	
T	Apa perusahaan punya sistem pengendalian internal? Seperti struktur organisasi dan rincian tugas dan tanggung jawab organ perusahaan, dan audit?
J	Punya
T	Bagaimana rincian tugas dan tanggungjawab organ perusahaan dan karyawan biar jelas dan sesuai dengan nilai perusahaan serta strategi perusahaan?
J	Itu diatur di <i>job description</i> dan SOP perusahaan
T	Apakah <i>job description</i> perusahaan sudah ada secara tertulis?
J	Iya
T	Apakah penyampaian selalu dilakukan secara tertulis?
J	Gak, biasanya pas rapat juga

Responsibility	
T	Apakah perusahaan sudah melakukan CSR terhadap lingkungan?
J	Belum
T	Kenapa perusahaan belum melakukan CSR terhadap lingkungan?
J	Kan perusahaan bukan produksi jadi gak menghasilkan limbah yang mengganggu lingkungan sekitar
T	Bagaimana CSR perusahaan terhadap masyarakat?
J	Tidak mencemari lingkungan
T	Apakah perusahaan membatasi hak – hak konsumen?
J	Tidak
T	Hak – hak konsumen seperti apa yang tidak dibatasi oleh perusahaan?
J	Jadi seperti ada barang rusak itu bisa dikasih ke perusahaan buat diganti yang baru tetapi kalo pengiriman barang dilakukan oleh perusahaan, atau barang yang di pesan beda sama barang yang dikirim dan untuk pengembalian/perbedaan pesanan barang dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 hari setelah barang dikirim
T	Apakah setiap organ perusahaan telah mengikuti peraturan perusahaan?
J	Iya

Independency	
T	Apakah setiap keputusan selalu dilakukan oleh pemegang saham terbesar?
J	Iya, tetapi sebelum itu ada rapat pemegang saham

T	Apakah ada perbedaan pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam mengikuti rapat?
J	Gak ada
T	Apa tujuan perusahaan dalam melakukan rapat pemegang saham?
J	Biar keputusan gak berdasarkan pendapat satu pihak aja
T	Bagaimana pembagian keuntungan untuk pemegang saham?
J	Pembagiannya berdasarkan dividen
T	Apakah perusahaan pernah mendapat tekanan dari pemegang saham?
J	Gak ada
T	Apakah setiap karyawan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya?
J	Iya
T	Apakah setiap organ menyelesaikan tugasnya masing – masing?tidak saling melempar tugas?
J	Iya, setiap organ perusahaan menyelesaikan tugasnya masing – masing dan tidak saling melempar tanggung jawab meskipun seringkali pekerjaan dilakukan tidak selesai tepat waktu
T	Apakah ada regulasi pemerintah yang berdampak secara langsung terhadap kinerja perusahaan?
J	Tidak berdampak
T	Apakah ada LSM yang mengganggu perusahaan?seperti demo buruh yang sedang ramai dibicarakan?

<i>Fairness</i>	
T	Apakah setiap pemangku kepentingan mempunyai hak untuk memberikan pendapat?
J	Iya
T	Apakah rapat pemegang saham selalu diikuti oleh semua pemegang saham?
J	Iya, kan itu wajib
T	Apa hak pemegang saham?
J	Menerima laporan performa perusahaan dan keuangan dan juga berhak memberikan pendapatnya
T	Apakah ada perlakuan berbeda terhadap gender karyawan?
J	Gak ada
T	Berapa jumlah pekerja wanita dan laki – laki di perusahaan?
J	pekerja wanita hanya 1 di divisi keuangan, kalau untuk pekerja laki – laki saya lupa
T	Apa alasan perusahaan menggunakan pekerja wanita pada divisi keuangan?
J	Karena pekerja wanita lebih teliti sehingga dianggap cocok untuk bekerja pada bidang tersebut
T	Kenapa perusahaan tidak menggunakan pekerja wanita pada divisi – divisi yang lain?
J	Belum ada kebutuhan untuk mempekerjakan pekerja wanita pada divisi yang lain
T	Agama apa saja yang dianut oleh karyawan di perusahaan?
J	Kristen dan Islam

Narasumber 3

Nama : Y.A

Asal Perusahaan : Bank Sulselbar Makassar

<i>Transparency</i>	
T	Apakah informasi pada perusahaan diberikan secara terbuka kepada karyawan?
J	Iya
T	Informasi apa saja yang diberikan secara terbuka?
J	Macem – macem sih, misalnya informasi mengenai visi dan misi
T	Apa peraturan jam kerja serta target jangka panjang perusahaan?
J	jam masuk kerja setiap senin – sabtu yaitu pada pukul 08.00 WIB, terus target perusahaan masuk pasar indonesia bagian timur dan ikut tender proyek pemerintah
T	Bagaimana penyampaian informasi tersebut? Apa secara langsung?
J	Banyak sih gak cuma secara langsung aja kadang pake telepon atau sms
T	Kenapa menggunakan media – media? Kenapa tidak secara langsung saja?
J	Ya kalau pas libur, atau pas lagi gak di kantor
T	Apakah informasi yang di dapat selalu bersumber dari atasan?
J	Gak, ada informasi yang dari karyawan juga
T	Bagaimana penyampaian kebijakan ke karyawan?
J	Biasanya di sampein pas rapat tetapi terkadang juga disampein diluar rapat
T	Apakah kebijakan perusahaan selalu didasarkan kepada kepentingan karyawan?
J	Iya

T	Misalnya kebijakan yang seperti apa?
J	Perusahaan ada sediain memo buat setiap karyawan untuk nulis pendapatnya yang disampein waktu rapat mingguan, terus pernah ada keluhan dari karyawan soal jangka waktu cuti nah kebijakan itu kemudian dibahas lagi pas rapat dan mencapai kesepakatan jangka waktu cuti 24 hari setiap tahun terus bisa diuangkan juga kalau gak di pake terus perusahaan juga sediain memo buat karyawannya juga untuk tulis pendapat nanti di sampein pas rapat Mingguan

Accountability	
T	Apa perusahaan punya sistem pengendalian internal? Seperti struktur organisasi dan rincian tugas dan tugas dan tanggung jawab organ perusahaan, dan audit?
J	Iya ada
T	Bagaimana rincian tugas dan tanggungjawab organ perusahaan dan karyawan biar jelas dan sesuai dengan nilai perusahaan serta strategi perusahaan?
J	Itu di atur di SOP sama ada <i>job description</i> tiap divisi
T	Apakah sudah ada secara tertulis?
J	Kalau <i>job description</i> sudah tetapi kalau SOP belum
T	Apakah penyampaian <i>job description</i> selalu tertulis?
J	Tidak, selain tertulis juga disampein pas rapat
T	Apa tugas bagian keuangan? Terus harus melapor kemana?

J	Tugas dan tanggung jawab bagian keuangan ya menyusun keuangan perusahaan, terus melapor ke manajer, pelaporan juga gak boleh langsung ke direktur karena gak sesuai sama aturan dan sistem
T	Apakah ada evaluasi khusus untuk karyawan ketika perekrutan maupun masa kerja?
J	Ada
T	Evaluasi seperti apa?
J	Interview sama tes psikologi

Responsibility	
T	Apakah perusahaan sudah melakukan CSR terhadap lingkungan?
J	Kayaknya sih belum
T	Kenapa perusahaan belum melakukan CSR terhadap lingkungan?
J	Saya kurang tau
T	Bagaimana CSR perusahaan terhadap masyarakat?
J	Kayaknya masih belum ada, hanya tidak membuang sampah sembarangan aja dan tidak membuat keributan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar misalnya kegiatan

Independency	
T	Apa tugas bagian keuangan?
J	Tugas dan tanggung jawab bagian keuangan ya menyusun arus kas perusahaan
T	Apakah ada dominasi atau melempar tanggung jawab antara karyawan?
J	Tidak ada
T	Apakah perusahaan memberikan susunan kompensasi sesuai dengan ketentuan pemerintah dan berdasarkan kinerja karyawan? Misalnya upah, tunjangan makan, kelangsungan pekerjaan, kondisi lingkungan kerja, uang cuti, dll?
J	Iya sudah
T	Apakah perusahaan menggunakan jasa konsultan?
J	Iya, ada jasa konsultan pajak

Fairness	
T	Apakah setiap pemangku kepentingan mempunyai hak untuk memberikan pendapat?
J	Iya, seperti yang telah saya jelaskan tadi mengenai kebijakan jangka waktu cuti
T	Apakah ada perlakuan berbeda terhadap gender karyawan?
J	Gak ada
T	Berapa jumlah pekerja wanita dan laki – laki di perusahaan?
J	Pekerja wanita cuma saya, yang lainnya pekerja laki – laki
T	Apakah perusahaan memberikan hak pekerja wanita? Misalnya hak untuk cuti hamil, dsb?
J	Iya

T	Apakah perusahaan melakukan perlakuan yang sama terhadap pekerja wanita maupun pria?misalnya pemberian tunjangan dan sebagainya?
J	Iya, perusahaan tetap memberikan hak – hak yang sama misalnya gaji dan tunjangan serta pemberian THR semua didasarkan pada kinerja dan jabatan karyawan.
T	Agama apa saja yang dianut oleh karyawan di perusahaan?
J	Kristen dan Islam
T	Apakah ada perbedaan pemberian THR?misalnya perbedaan THR dan sebagainya?
J	Tidak ada sih, semuanya dapat THR yang sama
T	Bagaimana proses jenjang karir dan kenaikan gaji karyawan?berdasarkan apa?
J	Berdasarkan kinerja karyawan tersebut
T	Bagaimana sistem reward pada perusahaan?
J	Kalau kinerja baik perusahaan memberikan bonus
T	Bagaimana sistem punishment pada perusahaan?
J	Kalau melanggar aturan di kasih SP sebanyak 3x. untuk keterlambatan karyawan membayar Rp.2.500/menit, kalau tidak masuk tanpa pemberitahuan dilakukan pemotongan gaji.

Nara sumber M.V :

1. **Transparansi** : Para Pimpinan Direksi melakukan penyampaian informasi melalui rapat yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham, stakeholders dan setiap mereka membuat proyeksi berdasarkan penilaian beberapa pihak tetapi tetap mengacu kepada GCG , dan hubungannya terhadap kinerja keuangan sangat berpengaruh karena GCG merupakan dasar pengambilan keputusannya karena di GCG terdapat kerangka, aturan dan dasar , jadi setiap pengambilan keputusan di bidang kinerja keuangan mengacu kepada GCG , dan pasti apapun didalam GCG itu otomatis menginginkan yang terbaik terhadap keuangan untuk perusahaan. transparansi jelas transparansi krn laporan keuangan itu sudah disampaikan baik ke public untuk laporan keuangan bisa dilihat di website nya , sebelum laporan keuangan otomatis itu sudah diajukan terdahulu kepada konsultan BPD untuk melihat apa laporan itu sudah benar lalu disampaikan ke public
2. **Akuntabilitas** : Sebagai karyawan pemerintah apapun yang diberikan oleh atasan pasti dikerjakan karena apapun strategi perusahaan yang diberikan mereka otomatis sebagai pegawai menjalankan tugas tersebut , kalau untuk pihak eksternal seperti pemerintah mereka pasti juga mendukung apa yang Bank Sulselbar ingin lakukan.
3. **Tanggungjawab** : CSR salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap social dan lingkungan , perusahaan khususnya Bank Sulselbar

CSR nya itu terus berjalan dan memang ada pos tersendiri dalam artian ada yang telah khusus sudah dianggarkan untuk CSR setiap tahunnya

4. Independensi : Pemegang saham Bank Sulselbar adalah pemerintahan daerah dan bisa jadi Bank daerah diintervensi oleh Pemerintahan Daerah . Dampak dari aturan pemerintah jika tdk saling selaras, harusnya diselaraskan contohnya harus mendorong atau membantu pemerintah untuk mengadakan hal yg ia mau karena bank RKUD maksudnya bank penyimpanan pemerintah ada di bank daerah dalam hal ini Bank Sulselbar, apabila jika ingin bersinergi antara Pemerintah dan Bank Daerah maka apa yang diinginkan oleh pemerintahan daerah mengenai pengelolaan uangnya apabila mereka ingin lebih digital contoh otomatis mereka minta bantuan ke Bank Sulselbar dan Bank Daerah harus menolong atau membantu untuk percepatan digital. Bank Sulselbar memiliki audit eksternal yaitu OJK dan BPD
5. Fairness : Untuk pengambilan keputusan dalam RUPS pemegang saham mayoritas mengendalikan secara penuh terhadap kebijakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan, dalam hal ini Provinsi Sulsel. Kemudian pemegang saham pernah mengalami perbedaan pendapat dengan orang orang pemangku kepentingan di Bank Sulselbar tetapi masing masing punya aturan , pemerintah punya aturan tersendiri sedangkan Bank Sulselbar walaupun di intervensi oleh pemerintah tetap ia mengacu pada regulasi dalam artian OJK dan Bank Indonesia , pemegang saham mayoritas punya saham sekitar 50% ,contoh

pemerintah provinsi anggaphlah punya saham 20% lalu kabupaten kabupaten masing masing punya saham mungkin ada 5% ada 10% , jadi terbagi dua ada 50% provinsi dan 50% kabupaten , jika semua Kabupaten mayoritas mengatakan YA pada RUPS sementara pemegang saham yang lain yang jumlah nya juga 50% semuanya bilang tidak otomatis seimbang, tetapi jika ada 1 orang yang mengatakan TIDAK otomatis presentasinya diatas 50% maka tetap yang mayoritas yang diikuti.

Nara sumber A.S.Y :

1. Transparansi : Informasi perusahaan diberikan secara terbuka kepada karyawan seperti Visi dan Misi perusahaan, peraturan perusahaan, target perusahaan dan masih banyak lagi seperti informasi laporan keuangan. Penyampaian informasi untuk masyarakat itu per tahun disampaikan tapi laporannya per triwulan , cara penyampaian informasi ke Bank Indonesia lalu pengelolaan kinerja keuangan , jika di Bank Indonesia ibaratnya sudah memenuhi , lalu di publish di web Bank Sulselbar. Kemudian untuk masalah kebijakan perusahaan, setiap kebijakan itu seperti contoh mengatur suku bunga kredit seperti suku bunga mengacu pada Bank Indonesia, anggaphlah deposito mempunyai suku bunga biasanya semakin banyak deposito dalam artian semakin banyak modal sementara seperti dana pihak ke 3 lagi kurang dan karyawan ingin meningkatkan dana pihak ke 3 nya sementara batas untuk bunga itu dibatasi.

2. Akuntabilitas : RUPS dalam setahun satu kali dilakukan jadwal rutin (agenda) tergantung jika ada pembahasan yang urgent yang perlu dibahas maka diadakan RUPS , dan setiap rapat RUPS semua kepentingan harus hadir. Untuk mengukur kinerja keuangan setiap cabang memiliki target, jika sesuai target dikasih reward tetapi jika tidak sesuai target mungkin dalam artian finisemen (hukuman). Untuk jangka panjang strategi lebih mengacu kepada Visi dan Misi perusahaan
3. Tanggung Jawab : Sistem CSR dan lingkungan itu berjalan krn dianggarkan pertahun jadi biasanya kalau di Bank Sulselbar lebih kepada permintaan pemerintah meminta untuk sosial dan lingkungan masing masing Kabupaten dan Bank Sulselbar mendukung itu
4. Indenpendensi : Setiap keputusan selalu dilakukan oleh pemegang saham terbesar, tetapi sebelum itu diadakan rapat pemegang saham. Tujuan diadakan nya rapat pemegang saham agar keputusan tidak berdasarkan pendapat dari satu pihak saja, kemudian pembagian keuntungan untuk pemegang saham berdasarkan dividen.
5. Fairness : Perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan nya dalam bentuk bonus apabila mencapai laba tertentu dalam bentuk jaspro (jasa produksi) maka diberikan reward dalam bentuk prestasi atau penghargaan karir. Hal itu dilakukan agar karyawan berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya masing-masing jadi dengan begitu

akan berdampak di kinerja perusahaan.

Nara sumber Y.A :

1. **Transparansi** : Informasi perusahaan diberkecara terbuka kepada karyawan, cara penyampaian kebijakan ke karyawan biasanya disampaikan pada saat rapat tapi terkadang juga disampaikan diluar rapat. Kebijakan perusahaan selalu didasarkan kepada kepenian karyawan misalnya seperti perusahaan ada sediakan memo buat setiap karyawan untuk menulis pendapatnya yang disampaikan waktu rapat mingguan, terus pernah ada keluhan dari karyawan soal jangka waktu cuti , nah kebijakan itu kemudian dibahas lagi pada saat rapat.
2. **Akuntabilitas** : Pembentukan struktur perusahaan itu berdasarkan kebutuhan perusahaan seperti adanya divisi keuangan, costumer service, marketing, operasional, dll, dan mereka semua mempunyai job description dan ada SOP juga, jadi tiap karyawan tau apa yang harus dikerjakan terus tau juga harus melapor kemana . Jika ada karyawan yang ternyata pada saat menjalankan tugas dan terjadi kesalahan akan diberikan peneguran secara langsung.
3. **Tanggung Jawab** : : CSR salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap social dan lingkungan. Biasanya kalau di Bank Sulselbar lebih kepada permintaan permintaan pemerintah meminta untuk sosial dan lingkungan masing masing Kabupaten dan Bank Sulselbar mendukung itu
4. **Indenpendensi** : Tidak ada peraturan pemerintah yang membatasi

kinerja perusahaan , walaupun terjadi perbedaan pendapat apabila jika ingin bersinergi antara Pemerintah dan Bank Daerah maka apa yang diinginkan oleh pemerintahan daerah mengenai pengelolaan uangnya apabila mereka ingin lebih digital contoh otomatis mereka minta bantuan ke Bank Sulselbar dan Bank Daerah harus menolong atau membantu untuk percepatan digital. Bank Sulselbar memiliki audit eksternal yaitu OJK dan BPD

5. Fairness : Hak dari pemegang saham yaitu menerima laporan performa perusahaan , keuangan dan juga berhak memberikan pendapatnya. Kemudian dari pihak karyawan tidak ada perlakuan berbeda terhadap gender karyawan. Dan sistem reward perusahaan berdasarkan kerja karyawan kalau bagus diberikan komisi atau bonus kemudian sistem punishment dikasi SP 3 kali kalau sudah SP ke 3 karyawan tersebut dipecat.

4.3 Pembahasan

Setiap membuat proyeksi Bank Sulselbar tetap mengacu kepada GCG karena GCG merupakan dasar pengambilan keputusan, karena di GCG terdapat kerangka dan aturan dasar. Setiap informasi perusahaan diberikan secara terbuka kepada karyawan dan disampaikan melalui rapat dan terkadang juga diluar rapat, masyarakat juga diberikan informasi dan dapat diakses melalui website Bank Sulselbar.

Untuk rincian tugas dan tanggung jawab karyawan itu mereka sebagai karyawan selalu mendukung dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan karena

semuanya demi kepentingan perusahaan agar bisa lebih maju. Semua karyawan sudah diatur dan ditempatkan di divisi masing masing jadi mereka tau apa yang harus dikerjakan dan harus melapor kemana.

Salah satu bentuk tanggung jawab Bank Sulselbar Makassar yaitu dalam bentuk CSR tanggung jawab terhadap social dan lingkungan. Bank Sulselbar Makassar telah menyediakan pos tersendiri atau ada yang telah khusus dianggarkan untuk CSR setiap tahunnya.

Pengambilan keputusan oleh pemegang saham terbesar berdasarkan diskusi dngan pemegang saham yang lain, perusahaan melakukan RUPS tahunan rutin satu kali setahun kecuali ada pembahasan yang urgent maka terkadang dalam setahun ada dua kali diadakan RUPS.

Setiap pemangku kepentingan mempunyai hak untuk memberikan pendapat selama pendapat yang diberikan berhubungan dengan kepentingan perusahaan. Kemudian hak pemegang saham adalah menerima laporan keuangan dan performa perusahaan dalam 1 tahun, rapat pemegang saham wajib diikuti oeh semua pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Kemudian perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawannya dalam bentuk prestasi apabila bagus diberikan komisi atau bonus kemudian sistem punishment dikasi SP 3 kali kalau sudah SP ke 3 karyawan tersebut dipecat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Good Corporate Governance pada PT. Bank Sulselbar Makassar, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil wawancara yang diperoleh maka penilaian terhadap peran Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank Sulselbar Makassar penulis telah mendapatkan kesimpulan bahwa 5 prinsip dasar yang terdapat pada Good Corporate Governance berjalan baik di perusahaan Bank Sulselbar Makassar seperti prinsip Transparency dan Fairness telah menjalankan prinsip keterbukaan serta kewajiban dalam pemberi informasi secara adil dan baik didalam melaksanakan tata kelola perusahaan pada Bank Sulselbar Makassar.

5.2 Saran

1. Saran bagi Perusahaan

Diharapkan kepada segenap jajaran PT. Bank Sulselbar Makassar agar tetap mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian terus mengadakan evaluasi terhadap peran yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dimasa-masa yang akan datang Good Corporate Governance (GCG) dapat menjadi budaya perusahaan.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa mengkaji lebih dalam

lagi mengenai Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan kelengkapan dan sesuai struktur pelaksanaan GCG dengan peraturan- peraturan yang ada dengan berdasarkan pengumpulan data secara wawancara langsung dan observasi, agar dapat diperoleh gambaran sesungguhnya dari implementasi GCG.



DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2004. Peraturan Bank Indonesia tanggal 31 Mei 2004 PBI Nomor.6/23/DPNP/2004 tentang Perihal Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia. 2013. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia 2016. Booklet Perbankan Indonesia. Jakarta
- Basma. 2017. “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC di Indonesia (Studi Komparatif: Bank BUMN, Bank Swasta Nasional, dan Bank Asing Tahun 2013-2015). Skripsi. Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
- Dendawijaya, Lukman.2005. Manajemen Perbankan Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Emilia. 2017. “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital) pada PT. BNI Syariah. Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
- Gitosudarmo dan Basri, 1992, Manajemen Keuangan, Edisi Ketiga, Penerbit BPFE Yogyakarta.
- warning system: Studi kasus pada perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Otoritas Jasa keuangan. 2017. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
- Srimindarti, Ceacilia. 2004. Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja. Focus Ekonomi, III.
- Triandaru, Sigit dkk. “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”. Edisi ke-2. Salemba Empat. Yogyakarta, 2006.
- Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Zarkasyi, Moh, Wahyudin, 2008. Good Corporate Governance, Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, cetakan ke satu. Penerbit Alfabeta, Bandung

Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. www.bi.go.id. 31 Mei.

Bank Indonesia. 2007. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. www.bi.go.id. 30 Mei.

Badriyah Rifai Amiruddin. Peranan Komisaris Independen dalam Mewujudkan GCG di Tubuh Perusahaan Publik, Pendidikan Network, 23 Januari 2004, Jakarta.

Imam Sjahputra Tunggal dan amin widjaja Tunggal, Membangun Good Corporate Governance (GCG), Harvarindo, Jakarta, 2002.

Komite Nasional kebijakan Corporate Governance (KNKCG), Profil Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, KNKCG, Jakarta 2001.

MANE, Arifuddin. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT. INCIPNA INDONESIA MAKASSAR.

Yusuf, A. M. *ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN METODE RISK PROFIL, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL (RGEC) SEBAGAI EARLY WARNING SYSTEM (EWS) PADA PT BANK SULSELBAR MAKASSAR*. Diss. Universitas Bosowa, 2020.